

ISBN 978-602-72935-1-9



## **PROSIDING**

**SEMINAR NASIONAL 2017**

**Kerja Sama**

**Universitas Panca Bhakti**

**Universitas Tanjungpura**

**Dengan**

**Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia**

**Dalam Rangka**

**Rapat Kerja**

**PERHIMPUNAN EKONOMI PERTANIAN INDONESIA**

**(PERHEPI)**

**TEMA**

**“Solusi Penyediaan Lahan untuk**

**Kesejahteraan Petani Berkelanjutan”**

Pontianak 21 Januari 2017

Penerbit

**UNIVERSITAS PANCA BHAKTI**

**Pontianak 21 Januari 2017**

**PROSIDING  
SEMINAR NASIONAL  
PERHIMPUNAN EKONOMI PERTANIAN INDONESIA 2017**

**Penyunting:**

**Rahmatullah Rizieq  
Donna Youlla  
Sri Widarti  
Ekawati  
Ellyta**

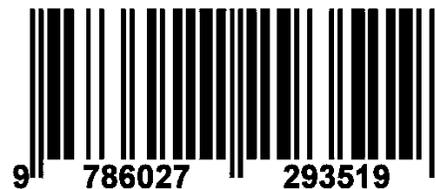
**Tim Ahli:**

**Dr. Endah Murniningtyas  
Dr. Agusalim Masulili  
Dr. Suardi Bakri  
Dr. Erlinda Yurisinthae**

**Desain dan Tata Letak:**

**Rahmatullah Rizieq  
Setiawan**

ISBN 978-602-72935-1-9



**Kerjasama**



**Alamat Redaksi**

Universitas Panca Bhakti Potianak  
Jl. Kom. Yos Sudarso, Pontianak  
Telp: (0561) 772627  
Laman <http://upb.ac.id>

**PROSIDING**  
**SEMINAR NASIONAL 2017**  
**PERHIMPUNAN EKONOMI PERTANIAN INDONESIA**  
**(PERHEPI)**

**TEMA**  
“Solusi Penyediaan Lahan untuk Kesejahteraan Petani Berkelanjutan”

Pontianak 21 Januari 2017

Editor:  
Rahmatullah Rizieq  
Sri Widarti  
Ekawati  
Dona Youlla  
Ellyta

ISBN 978-602-72935-1-9



**UNIVERSITAS PANCA BHAKTI**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, Seminar Nasional Perhimpunan Ekonomi Pertanian 2017 yang dilaksanakan di Pontianak tanggal 21 Januari 2017 telah dilaksanakan. Seminar ini bertema "Solusi Penyediaan lahan Untuk Kesejahteraan Petani Berkelanjutan". Seminar ini dilaksanakan sebagai rangkaian acara Rapat Kerja Nasional PERHEPI 2017. Seminar ini merupakan kerjasama antara Program Studi Agribisnis Universitas Panca Bhakti dan Program Studi Agribisnis Universitas Tanjungpura dengan PERHEPI Komisariat Daerah Pontianak dengan

Seminar ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama menghadirkan 5 (lima) orang pembicara yang terdiri dari Pembicara Kunci dan Pembicara Panel. Pembicara kunci adalah Bapak Sofyan Jalil (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia), sedangkan 4 (empat) orang pembicara lainnya adalah (1). (2). (3). dan (4). Pada sesi kedua, ada 76 pemakalah yang dibagi kedalam 4 (empat) subtema.

Prosiding ini merupakan kumpulan dari makalah yang disampaikan pada seminar tersebut. Semoga prosiding ini dapat menjadi bahan bacaan dan merupakan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ekonomi di Indonesia.

Ttd

Tim Editor

## DAFTAR ISI

SISTEM PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS DALAM MENDUKUNG REFORMA AGRARIA UNTUK AGRIBISNIS BERKELANJUTAN <i>Adi Ankafia, Budi Mulyanto, Erik Saropie</i> .....	1
MENGHADIRKAN KEMBALI MODEL TATA KELOLA LAHAN BERBASIS MASYARAKA LOKAL <i>Yayat Sukayat, Ahmad Choibar Tridakusamah, Lies Sulistyowati</i> .....	9
ANALISIS PROFITABILITAS DAN NILAI TAMBAH INDUSTRI GULA AREN SEBAGAI LANGKAH AWAL PEMANFAATAN HUTAN RAKYAT DENGAN BUDIDAYA TANAMAN AREN DI KABUPATEN ACEH BARAT <i>Awin Nasution</i> .....	13
PENGELOLAAN LAHAN BERKELANJUTAN MELALUI PENDEKATAN LAND RENT <i>Cungki Kusdarjito, Any Suryantini</i> .....	21
IMPLEMENTASI DAN DAMPAK PERATURAN BIDANG LAHAN DAN AIR DI PROVINSI JAWA TIMUR <i>Cut R. Adawiyah, Chairul Muslim dan Rusli Burhansyah</i> .....	29
PEMBERDAYAAN LAHAN KOMUNAL MELALUI AKSI RISET SEKOLAH KOPI RAKYAT (SKR) DI KABUPATEN MAMASA (COMMUNAL LAND EMPOWERMENT THROUGH ACTION RESEARCH “SEKOLAH KOPI RAKYAT” (SKR) IN MAMASA REGENCY) <i>Eka Intan Kumala Putri, Sofyan Sjaf, Danang pramudita, Hanifah Fauziah Gunadi</i> ....	39
ANALISIS STRATEGI PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI PADA PROGRAM KEBUN BENIH RAKYAT UNTUK KEGIATAN PENGHIJAUAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN PONTIANAK UTARA <i>Dona Youlla</i> .....	47
KEBIJAKAN PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA WANITA PENGRAJIN KERUPUK KEMPLANG YANG BERKELANJUTAN DI DESA MERANJAT II KECAMATAN INDRALAYA SELATAN KABUPATEN OGAN ILIR PROPINSI SUMATERA SELATAN <i>Eka Mulyana</i> .....	55
POLA KONSUMSI DAN KESEJAHTERAAN RUMAHTANGGA PETANI PADI SAWAH DI KECAMATAN RAMBAH SAMO KABUPATEN ROKAN HULU, PROVINSI RIAU <i>Elinur</i> .....	61
RESPON PETANI TERHADAP SISTEM TANAM JARWO DI DESA RIAM BUNUT KABUPATEN KETAPANG <i>Ellyta, Lusia Sri Purwaningsih</i> .....	69

ANALISIS KOMODITAS UNGGULAN UNTUK PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN DI KAWASAN PERBATASAN KECAMATAN JAGOI BABANG, BENGKAYANG <i>Eva Dolorosa</i> .....	77
ANALISIS PERMINTAAN DAGING SAPI DI PASAR MINGGU (PTM) KOTA BENGKULU <i>Fitri Mufriantje, Rita Feni, Riko Riswanto</i> .....	83
SISTEM BAGI HASIL: PENGELOLAAN USAHATANI PADI UNTUK GENERASI MUDA PETANI (STUDI KASUS DI KABUPATEN KLATEN) <i>Lestari Rahayu Waluyati, Jamhari, Abi Ratiwa Sireger</i> .....	89
AGRICULTURAL HOUSEHOLD ECONOMICS PADA KONDISI KEKERINGAN DI LAHAN SAWAH AKIBAT PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA <i>M. Yamin, Nurilla Elysa Putri</i> .....	95
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TEKNIK PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGANDI KOTA TARAKAN <i>Nia Kurniasih, Nur Indah Mansyur, Eko hary Pudjiwati</i> .....	101
SISTEM PENGUASAAN LAHAN RUMAHTANGGA PETANI PADI GOGO DI KONAWE SELATAN <i>Siti Aida Adha Taridala, Nur Isiyana Wianti</i> .....	107
POLICY INITIATIVE FOR SUSTAINABLE AGRIBUSINESS TO PROMOTES ECONOMIC GROWTH AND THE WELL-BEING: A CASE OF WEST KALIMATAN <i>Nurliza</i> .....	117
TINDAK BUDIDAYA TERHADAP PRODUKTIVITAS DAUN LIDAH BUAYA ( <i>ALOE VERA L.</i> ) DI KOTA PONTIANAK <i>Setiawan</i> .....	127
KEWAJIBAN NEGARA DALAM PEMENUHAN KEPEMILIKAN TANAH BAGI MASYARAKAT KHUSUSNYA KEPADAPARA PETANI <i>Setyo Utomo</i> .....	133
RESPON KELOMPOK WANITA TANI (KWT) TERATE TERHADAP PEMANFAATAN PESTISIDA NABATIPADA TANAMAN PEKARANGANDI DESA SEPANG KECAMATAN TOHO <i>Sri Widarti, Suparmi</i> .....	141
PENGELOLAAN LAHAN YANG BERKELANJUTAN MENDUKUNG PENINGKATAN DAYA SAING PERKEBUNAN SAWIT RAKYAT <i>Suci Wulandari</i> .....	147

REVITALISASI KANDANG DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN  
PETERNAK RAKYAT AYAM RAS PEDAGING

*Unang, Rina Nuryati, Enok Sumarsih* ..... 153

PENGEMBANGAN AGRIBISNIS KARET DALAM UPAYA MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN PETANI DI KABUPATEN ACEH BARAT

*Sri Handayani* ..... 167

# SISTEM PENGUASAAN LAHAN RUMAHTANGGA PETANI PADI GOGO DI KONAWE SELATAN

Siti Aida Adha Taridala<sup>1</sup> dan Nur Isiyana Wianti<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Staf pengajar pada Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo

<sup>2</sup> Staf pengajar pada Jurusan Penyuluhan Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo

## Abstrak

Tulisan ini ingin menggambarkan sistem penguasaan lahan pertanian bukan hanya dari sisi resiko yang ditimbulkannya, melainkan dari sisi peluang bagi pengembangan padi ladang di Konawe Selatan. Kemudian, tulisan ini merupakan sebagian kecil dari temuan *Baseline Survey* Rumahtangga Padi Gogo di Konawe Selatan, yang dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2016 dengan jumlah total responden sebesar 445 rumahtangga petani padi ladang, di empat sentra pertanian padi ladang di Kabupaten Konawe Selatan antara lain Kecamatan Wolasi, Laeya, Baito, dan Kolono. Berdasarkan data, dapat dikatakan bahwa sebagian besar petani padi ladang di keempat kecamatan yang menjadi wilayah penelitian merupakan petani pemilik. Petani lapisan bawah yang berlahan sempit atau gurem bahkan tidak berlahan atau tunakisma mengelola kegiatan pertanian bukan dengan sistem bagi hasil yang mengikat melainkan dengan sistem pinjam pakai dari pihak desa. Secara umum jika melihat seluruh luasan lahan yang dikuasai oleh responden rumahtangga petani untuk peruntukkan tidak hanya sebagai ladang, kebun campuran, persawahan dan lahan sagu, rata-rata luasan lahan yang dikuasai oleh responden baik secara milik sendiri maupun pinjam pakai maka rata-rata keseluruhan seluas 1 Ha. Pada beberapa kasus, memiliki lahan saja tidaklah cukup, karena luas lahan yang dimiliki sempit, kemudian mendorong responden petani di empat kecamatan terpilih untuk meminjam lahan pertanian. Gejala polarisasi kelas petani berdasarkan status kepemilikan lahan yang demikian tajam, yang biasa terjadi pada komunitas pertanian padi, di empat lokasi penelitian kecenderungan tersebut tidak terlihat nyata khususnya yang terjadi pada dua kecamatan antara lain di Wolasi dan Kolono. Hal ini dikarenakan selain sistem pertanian padi ladang dengan metode tebang bakar (*slash and burn*) atau huma yang berciri perladangan berpindah, juga karena adanya budaya orang Tolaki yang menjunjung nilai-nilai “pinjam tanpa balasan”.

Keywords : Sistem, Penguasaan Lahan, Padi Gogo, Konawe Selatan.

## Latar belakang

Konsep ketahanan pangan merupakan istilah yang pertama kali muncul pada Konferensi Pangan Dunia (*World Food Conference*) tahun 1974, yakni menunjukkan suatu kondisi di mana adanya ketidakmampuan suatu negara untuk mengelola dan memenuhi peningkatan konsumsi pangan serta mengelola fluktuasi harga dan produksi pangan yang seringkali terjadi yang dapat berujung pada munculnya kelaparan di tengah masyarakat. Cara pandang terhadap ‘ketahanan pangan’ tentu berimplikasi pada pembentukan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pertanian dan penyediaan pangan. Dengan cara pandang seperti di atas, kebijakan pertanian pangan kemudian lebih banyak diarahkan pada kegiatan produksi pangan secara massal dan tersedianya akses orang per orang, keluarga per keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan atas produk pangan yang dikembangkan melalui perdagangan (pangan didistribusi melalui mekanisme perdagangan) (Bernstein dan Bachriadi, 2014)

Kedaulatan pangan’ (*food sovereignty*) sebagai sebuah konsep tandingan terhadap konsep ketahanan pangan yang muncul pada saat berlangsungnya *World Food Summit* 1996 di Roma. Kedaulatan Pangan menekankan pada hak dan otonomi warga untuk mengembangkan sistem pangannya sendiri dan menolak gagasan “pangan dapat berasal dari mana saja” (“*food from somewhere*”) (Wittman, 2011 *dalam* Bernstein dan Bachriadi, 2014). Gagasan ‘kedaulatan pangan’ (*food sovereignty*) menegaskan kembali hak-hak masyarakat atas otonominya dalam memutuskan apa yang hendak mereka produksi dan konsumsi (Meneses 2001: 30); karena itu, produksi pertanian lokal, pemeliharaan hak petani untuk menghasilkan pangan dan jaminan hak-hak masyarakat untuk membuat pilihan terhadap kebijakan pertaniannya sangat diutamakan (Baumuller dan Tansey 2008, *dalam* Bernstein dan Bachriadi, 2014). Rumusan ‘kedaulatan pangan’ memiliki enam pilar, yakni: (1) fokus pada pangan untuk rakyat, (2) penghargaan pada produser pangan, (3) pengembangan sistem pangan

---

<sup>1</sup> Staf pengajar pada Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo

<sup>2</sup> Staf pengajar pada Jurusan Penyuluhan Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo

lokal, (4) menempatkan kontrol produksi pangan di tingkat lokal, (5) membangun pengetahuan dan keahlian, dan (6) bekerja selaras dengan alam (Forum for Food Sovereignty 2007 *dalam* Bernstein dan Bachriadi, 2014).

Gagasan mengenai kedaulatan pangan yang dijabarkan di atas nampak lekat dengan kondisi petani padi gogo/ladang di Konawe Selatan yang mewujudkan makna kedaulatan pangannya sebagai suatu perilaku bertani yang mempertahankan haknya untuk melakukan kegiatan pertanian secara tradisional dengan sistem tebang bakar (*slash and burn*) atau Huma sehingga menghasilkan pangan yang sehat, meskipun cenderung masih bersifat subsistensi (khususnya pada petani lokal Tolaki), namun berdaulat menentukan makanan dan sistem pertaniannya.

Namun, baik konsep ketahanan pangan maupun kedaulatan pangan selalu dikaitkan dengan sistem penguasaan lahan pertanian (*land tenure*). Wibowo (2013) *dalam* Harun dan Dwiprabowo (2014) menyatakan bahwa *land tenure* adalah isu yang paling kontemporer, penting dan tidak pernah “mati”, bahkan semakin kontekstual dan menemukan posisinya dalam dinamika pembangunan saat ini.

Tulisan ini ingin menggambarkan sistem penguasaan lahan pertanian bukan hanya dari sisi resiko yang ditimbulkannya, melainkan dari sisi peluang bagi pengembangan padi ladang di Konawe Selatan.

### **Metodologi**

Tulisan ini merupakan sebagian kecil dari temuan *Baseline Survey* Rumahtangga Padi Gogo di Konawe Selatan, yang dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2016 dengan jumlah total responden sebesar 445 rumahtangga petani padi ladang, di empat sentra pertanian padi ladang di Kabupaten Konawe Selatan antara lain Kecamatan Wolasi, Laeya, Baito, dan Kolono. Jumlah total responden sebanyak 445 rumahtangga. Jumlah responden di Kecamatan Wolasi sebanyak 73, di Kecamatan Baito sebanyak 156, di Kecamatan Kolono sebanyak 100 responden, dan di Kecamatan Laeya sebanyak 116 responden.

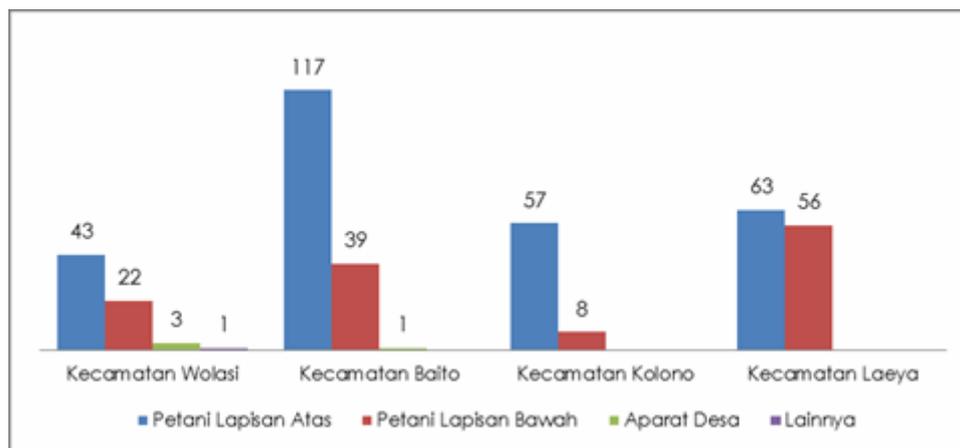
### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Gambaran Status Sosial dan Struktur Agraria Rumahtangga Petani Padi Ladang**

Status sosial rumahtangga petani padi ladang dalam penelitian ini dimaknai sebagai posisi kepala rumahtangga dalam struktur sosial. Posisi tersebut terkait dengan penguasaan lahan pertanian antara lain apakah lahan yang dikelola dikuasai melalui kepemilikan secara sah, ataukah lahan dikuasai dengan sistem sewa, bagi hasil, pinjam, dan sebagainya yang menjadi penegas bahwa rumahtangga petani merupakan petani lapisan bawah. Serta posisi tertentu terkait prestise kepala rumahtangga di dalam komunitasnya, misalnya apakah responden merupakan aparat desa ataupun tokoh masyarakat yang disegani karena terkait keturunan (*ascribe status*) ataupun kemampuan tertentu yang dimiliki (*achieve status*) misalnya sebagai pemimpin agama di komunitasnya.

Di dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan hak milik lahan yakni hak kepemilikan lahan yang dikuasai langsung oleh rumahtangga responden sendiri tanpa dapat diganggu gugat oleh siapapun yang ditunjukkan oleh tanda bukti dari pihak adat, maupun dari desa dan pemerintah atau BPN yang diperoleh baik melalui warisan maupun jual beli. Status kepemilikan sewa yaitu mengolah lahan orang lain atau pihak lain dengan kompensasi membayar uang atau biaya ataupun bentuk lainnya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yakni antara penyewa dengan pemilik lahan. Status kepemilikan bagi hasil yaitu mengelola lahan milik orang lain, dengan perjanjian bagi hasil tertentu yang telah disepakati oleh pemilik lahan pertanian dengan petani pengolah lahan pertanian. Sedangkan status kepemilikan pinjam yaitu mengelola lahan orang lain, tanpa ada perjanjian pembayaran uang atau biaya kompensasi tertentu, pada beberapa kasus, sistem pinjam cenderung pada kompensasi secara sosial.

Tabel 1 dan Gambar 1 menggambarkan sebaran responden berdasarkan status sosialnya pada setiap kecamatan terpilih sebagai lokasi penelitian.



Gambar 1. Sebaran Responden Berdasarkan Status Sosial di Kecamatan Wolasi, Baito, Kolono, dan Laeya, 2016

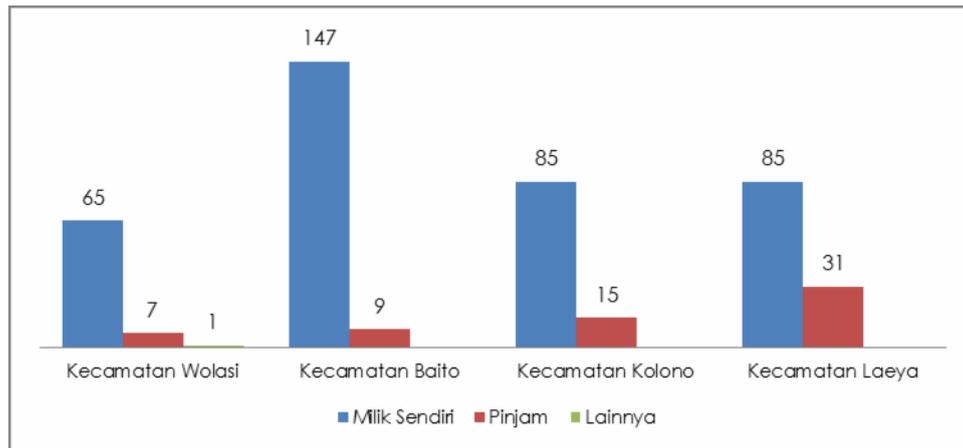
Tabel 1. Proporsi Responden Rumahtangga Petani Padi Ladang di Kecamatan Wolasi, Baito, Kolono, dan Laeya berdasarkan Status Sosial, 2016

Variabel	Komunitas Rumahtangga Petani Gogo							
	Kecamatan Wolasi		Kecamatan Baito		Kecamatan Kolono		Kecamatan Laeya	
Status Sosial Petani	n	%	n	%	n	%	n	%
Petani Lapisan Atas (pemilik)	43	62%	117	75%	57	88%	63	53%
Petani Lapisan Bawah (petani Gurem)	22	32%	39	25%	8	12%	56	47%
Aparat Desa	3	4%	1	1%	0	0%	0	0%
Pemimpin Agama	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Pemimpin Adat	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Tengkulak	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Lainnya	1	1%	0	0%	0	0%	0	0%
Total	69	100%	157	100%	65	100%	119	100%

Berdasarkan data pada Gambar 1 dan Tabel 1 dapat dikatakan bahwa sebagian besar petani padi ladang di keempat kecamatan yang menjadi wilayah penelitian merupakan petani pemilik. Sebanyak 43 responden rumahtangga petani di Kecamatan Wolasi atau sekitar 62 persen merupakan petani pemilik; Sebanyak 117 responden rumahtangga petani di Kecamatan Baito atau sekitar 75 persen merupakan petani pemilik; Sebanyak 57 responden rumahtangga petani di Kecamatan Kolono atau sekitar 88 persen merupakan petani pemilik; Sebanyak 63 responden rumahtangga petani di Kecamatan Kolono atau sekitar 53 persen merupakan petani pemilik.

Proporsi nyaris berimbang antara Petani lapisan bawah atau petani gurem dengan petani lapisan atas atau petani pemilik terjadi di Kecamatan Laeya. 63 responden petani merupakan petani lapisan atas atau pemilik, sementara 56 responden merupakan petani lapisan bawah atau petani gurem.

Status sosial rumahtangga petani tidak bisa dilepaskan dengan status penguasaan sumberdaya agraria dalam hal ini adalah lahan pertanian. Menurut Hayami dan Kikuchi (1987) bahwa sistem penguasaan tanah merupakan penentu utama alokasi sumberdaya dan distribusi pendapatan dalam komunitas agraris. Struktur agraria juga menunjukkan gejala polarisasi atau deferensiasi kelas petani. Pada kenyataannya yang terjadi pada komunitas padi ladang di dua kecamatan terpilih kurang menunjukkan gejala polarisasi petani seperti yang banyak terjadi pada kegiatan pertanian padi Sawah di wilayah Pulau Jawa terkecuali pada Kecamatan Baito dan Laeya seperti yang telah diuraikan pada bagian uraian dimensi etnis sebelumnya. Gambaran mengenai struktur kepemilikan lahan padi ladang oleh responden di empat kecamatan terpilih dapat dilihat dalam Gambar 2 dan Tabel 2.



Gambar 2. Proporsi Responden Rumahtangga Petani Padi Ladang di Kecamatan Wolasi, Baito, Kolono, dan Laeya berdasarkan Status Penguasaan Lahan Pertanian, 2016

Petani lapisan bawah yang berlahan sempit atau gurem bahkan tidak berlahan atau tunakisma mengelola kegiatan pertanian bukan dengan sistem bagi hasil yang mengikat melainkan dengan sistem pinjam pakai dari pihak desa. Misalnya di Kecamatan Wolasi, 7 orang responden atau sekitar 10 persen responden menguasai lahan pertanian dengan sistem pinjam pakai dengan pihak desa. Di Kecamatan Baito 9 rumahtangga petani atau sekitar 6 persen menguasai dengan sistem pinjam pakai. Di Kecamatan Kolono hanya 15 orang responden atau sekitar 15 persen yang menguasai lahan pertanian dengan sistem pinjam pakai kepada pemilik lahan pertanian. Sementara di Kecamatan Laeya sebanyak 31 orang atau 27 persen petani menguasai lahan pertanian dengan sistem pinjam pakai dengan pemilik lahan pertanian di desanya.

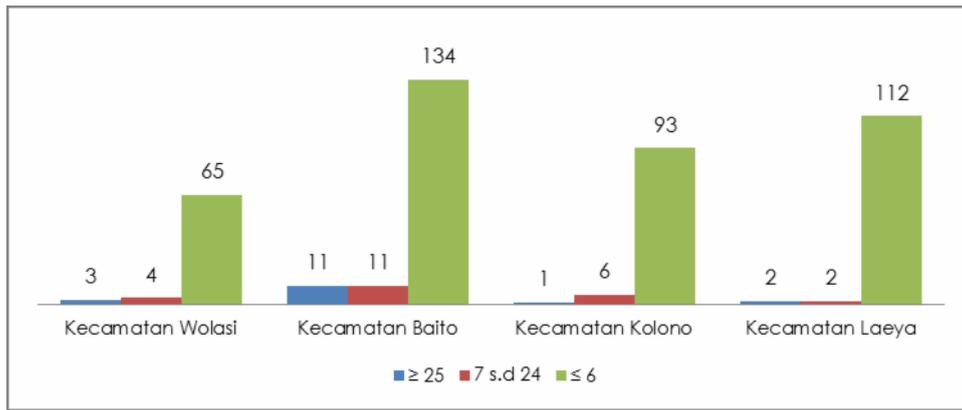
Tabel 2. Proporsi Responden Rumahtangga Petani Padi Ladang di Kecamatan Wolasi, Baito, Kolono, dan Laeya berdasarkan Status Penguasaan Lahan Pertanian, 2016

Variabel	Komunitas Rumahtangga Petani Gogo							
	Kecamatan Wolasi		Kecamatan Baito		Kecamatan Kolono		Kecamatan Laeya	
Status Lahan yang dimiliki	n	%	n	%	n	%	n	%
Milik Sendiri	65	90%	147	94%	85	85%	85	73%
Sewa	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Pinjam	7	10%	9	6%	15	15%	31	27%
Lainnya	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Total	72	100%	156	100%	100	100%	116	100%

Secara umum jika melihat seluruh luasan lahan yang dikuasai oleh responden rumahtangga petani untuk peruntukkan tidak hanya sebagai ladang, kebun campuran, persawahan dan lahan sagu, rata-rata luasan lahan yang dikuasai oleh responden baik secara milik sendiri maupun pinjam pakai maka rata-rata keseluruhan seluas 1 Ha. Untuk Kecamatan Wolasi seluas 1,4 Ha, Kecamatan Baito rata-rata seluas 3,7 Ha, Kecamatan Kolono rata-rata seluas 3,5 Ha, dan Kecamatan Laeya rata-rata seluas 1,7 Ha (lihat Tabel 3 dan Gambar 3).

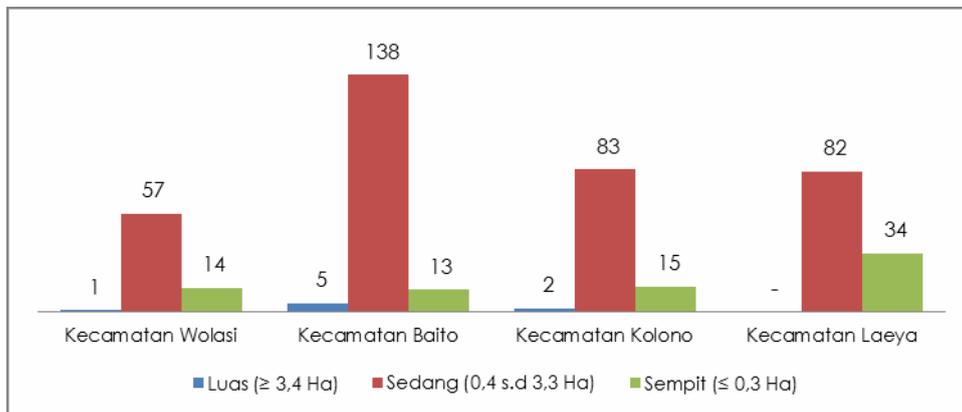
Tabel 3. Proporsi Responden Rumahtangga Petani Padi Ladang di Kecamatan Wolasi, Baito, Kolono, dan Laeya berdasarkan Total Keseluruhan Luasan Lahan Pertanian yang Dikuasai, 2016

Variabel	Komunitas Rumahtangga Petani Gogo							
	Kecamatan Wolasi		Kecamatan Baito		Kecamatan Kolono		Kecamatan Laeya	
Total Luas Lahan yang dikuasai oleh Responden	n	%	n	%	n	%	n	%
≥ 25	3	4%	11	7%	1	1%	2	2%
7 s.d 24	4	6%	11	7%	6	6%	2	2%
≤ 6	65	90%	134	86%	93	93%	112	97%
Total	72	100%	156	100%	100	100%	116	100%
Rata-rata (per kecamatan)	1,5		3,7		3,5		1,7	
rata-rata keseluruhan (semua kecamatan)	1							



Gambar 3. Proporsi Responden Rumahtangga Petani Padi Ladang di Kecamatan Wolasi, Baito, Kolono, dan Laeya berdasarkan Total Keseluruhan Luasan Lahan Pertanian yang Dikuasai, 2016

Jumlah responden di Kecamatan Wolasi dominan pada kategori luas lahan yang dikuasai kurang atau sama dengan 6 Ha, demikian halnya untuk tiga Kecamatan lainnya.



Gambar 4. Sebaran responden berdasarkan Luasan Lahan yang Dimiliki di Kecamatan Wolasi, Baito, Kolono, dan Laeya, 2016

Berdasarkan Tabel 4 dan Gambar 4 ditegaskan bahwa responden petani menguasai lahan pertanian dengan memiliki atau status sebagai pemilik rata-rata dengan luasan lahan sebesar 1,1 Ha. Luasan lahan pertanian di atas rata-rata keseluruhan terjadi di Kecamatan Baito dan Kolono, masing-masing 1,2 dan 1,3 Ha. Rata-rata terendah terjadi di Kecamatan Laeya yakni sekitar 0,7 Ha. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada pembahasan bagian etnis bahwa petani Tolaki dominan Tunakisma, untuk mengolah lahan petani tunakisma kemudian mengolah lahan HTI ex. Pt. Kapas secara Huma untuk memenuhi kebutuhan pangan rumahtangga.

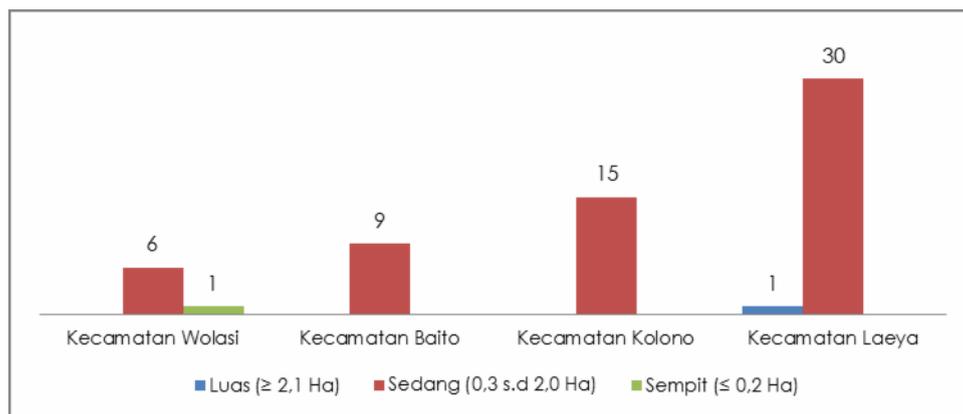
Tabel 4. Proporsi Responden Rumahtangga Petani Padi Ladang Berdasarkan Status Lahan yang Dimiliki di Kecamatan Wolasi, Baito, Kolono, dan Laeya, 2016

Variabel	Komunitas Rumahtangga Petani Gogo							
	Kecamatan Wolasi		Kecamatan Baito		Kecamatan Kolono		Kecamatan Laeya	
Luas lahan yang dimiliki sendiri	n	%	n	%	n	%	n	%
Luas (≥ 3,4 Ha)	1	1%	5	3%	2	2%	0	0%
Sedang (0,4 s.d 3,3 Ha)	57	79%	138	88%	83	83%	82	71%
Sempit (≤ 0,3 Ha)	14	19%	13	8%	15	15%	34	29%
Total	72	100%	156	100%	100	100%	116	100%
Rata-rata (per kecamatan)	1,0		1,2		1,3		0,7	
rata-rata keseluruhan (semua kecamatan)	1,1							

Sebagian besar responden di empat Kecamatan terpilih masuk di dalam kategori luasan lahan dari 0,4 Ha hingga 3,3 Ha. Petani berlahan luas yakni memiliki ladang dengan ukuran lebih besar dari 3,4 Ha paling banyak diantara empat kabupaten terpilih berada di Kecamatan Baito. Sebanyak 5 orang atau sekitar 3 persen responden merupakan petani pemilik berlahan luas.

Data penelitian menunjukkan bahwa di Kecamatan Laeya terdapat dua responden rumahtangga petani yang memiliki lahan pertanian, juga menguasai lahan milik orang lain dengan sistem pinjam pakai. Rata-rata luas lahan yang dikuasai dengan sistem pinjam tersebut yakni 1 Ha. Sementara lahan milik sekitar 0,625.

Pada beberapa kasus, memiliki lahan saja tidaklah cukup, karena luas lahan yang dimiliki sempit, kemudian mendorong responden petani di empat kecamatan terpilih untuk meminjam lahan pertanian. Meminjam lahan juga terjadi jika responden petani tidak memiliki lahan. Pada Gambar dan Tabel berikut akan diuraikan mengenai responden petani yang melakukan pinjam pakai dengan pihak desa, pemilik lahan dan pengelola lahan ex. PT. Kapas.



Gambar 5. Sebaran responden berdasarkan Luasan Lahan yang Dipinjam di Kecamatan Wolasi, Baito, Kolono, dan Laeya, 2016

Tabel 5. Proporsi Responden Rumahtangga Petani Padi Ladang Berdasarkan Status Lahan yang Dipinjam di Kecamatan Wolasi, Baito, Kolono, dan Laeya berdasarkan Status Sosial, 2016

Variabel	Komunitas Rumahtangga Petani Gogo							
	Kecamatan Wolasi		Kecamatan Baito		Kecamatan Kolono		Kecamatan Laeya	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Luas lahan pinjam								
Luas (≥ 2,1 Ha)	0	0%	0	0%	0	0%	1	3%
Sedang (0,3 s.d 2,0 Ha)	6	86%	9	100%	15	100%	30	97%
Sempit (≤ 0,2 Ha)	1	14%	0	0%	0	0%	0	0%
Total	7	100%	9	100%	15	100%	31	100%
Rata-rata (per kecamatan)	0,1		0,2		0,7		0,5	
rata-rata keseluruhan (semua kecamatan)	0,1							

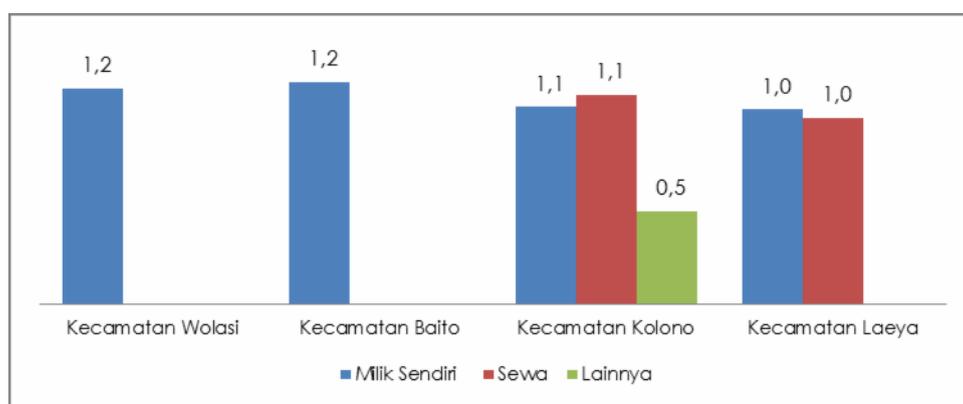
Responden petani di empat kecamatan terpilih yang meminjam lahan pertanian, rata-rata meminjam seluas 0,1 Ha. Di Kecamatan Wolasi 6 responden meminjam lahan dengan kategori luasan lahan pertanian antara 0,3 sampai dengan 2 Ha. Responden petani di Kecamatan Kolono, rata-rata meminjam sekitar 0,7 Ha. Sebanyak 15 orang responden meminjam juga dengan kategori luas lahan pada kisaran 0,3 sampai dengan 2 Ha. Di Kecamatan Laeya, terdapat 1 orang responden yang meminjam dengan luasan lahan di atas 2,1 Ha.

Gejala polarisasi kelas petani berdasarkan status kepemilikan lahan yang demikian tajam, yang biasa terjadi pada komunitas pertanian padi, di empat lokasi penelitian kecenderungan tersebut tidak terlihat nyata khususnya yang terjadi pada dua kecamatan antara lain di Wolasi dan Kolono. Hal ini dikarenakan selain sistem pertanian padi ladang dengan metode tebang bakar (*slash and burn*) atau huma<sup>3</sup> yang berciri perladangan

<sup>3</sup> Menurut Wolf (1983) *system swidden* (tebang-bakar) yakni system dimana tanah yang sudah tandus dibiarkan menganggur untuk jangka waktu yang lama (*long-term following systems*), yang kemudian dikaitkan dengan pembakaran hutan untuk membuka tanah dan bercocok tanam dengan menggunakan tajak. Sistem-sistem ini dinamakan *swidden systems* yang diambil dari sebuah kata dialek Inggris yang berarti "membuka tanah dengan membakar". Bercocok tanam dengan mencakup beberapa tahap. Pertama, tanah dibuka dengan jalan membakar vegetasi yang menutupinya. Kedua, benih ditaburkan di atas lahan itu, biasanya tanpa diberi pupuk tambahan selain abu vegetasi yang

berpindah, juga karena adanya budaya orang Tolaki yang menjunjung nilai-nilai “pinjam tanpa balasan”. Hampir semua responden mengungkapkan bahwa tidak ada kesepakatan tertulis mengenai balas jasa atas pinjaman lahan yang mereka peroleh. Misalnya saja kasus rumahtangga informan kunci Ibu IM mengungkapkan bahwa selama berpuluh-puluh tahun Ia dan keluarganya tidak memiliki lahan pertanian, dan selama ini melakukan sistem perladangan berpindah. Lahan yang dipinjam atas persetujuan pihak desa sebagai pemilik sah lahan pertanian yang mereka kelola. Tidak ada upeti atau pemberian tertentu dari masyarakat kepada pihak desa. Demikian halnya yang terjadi pada kegiatan pertanian padi ladang di kecamatan Kolono. Para petani yang tunakisma meminjam lahan pertanian kepada pemilik lahan pertanian, dan tidak ada kewajiban memberikan hasil pertanian kepada pemilik pertanian seperti layaknya di pedesaan Jawa. Pemilik lahan pertanian sudah cukup bersyukur atas bantuan petani tunakisma tersebut yang merawat dan menjaga lahan pertanian yang dimilikinya.

Responden petani tidak hanya mengandalkan ladang untuk kegiatan pertanian, beberapa kasus ditemukan petani memiliki sawah dan kebun campuran, serta ternak yang biasanya digunakan sebagai *buffer income* dan sumber nutrisi bagi unsur hara tanah melalui kotoran ternak, sehingga tidak mengherankan jika ternak unggas dibiarkan bebas berkeliaran di ladang. Bahkan untuk petani yang telah mapan dan berlahan luas, ternak khususnya sapi digunakan untuk tabungan bahkan sebagai modal usaha jual beli ternak sapi.



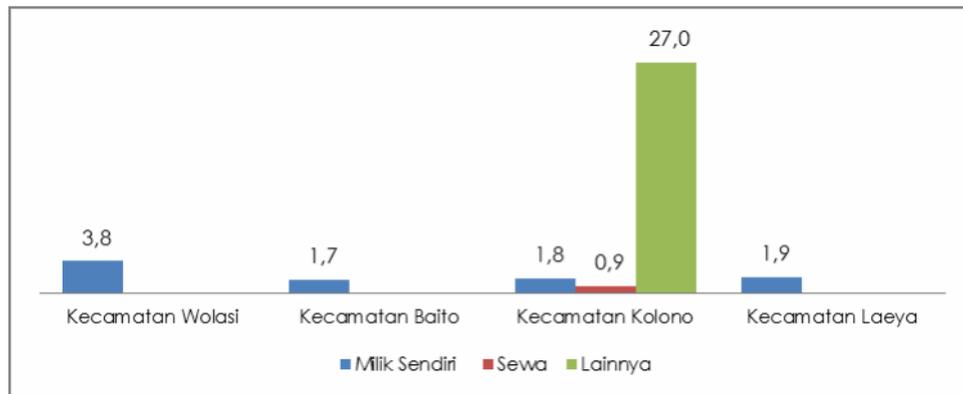
Gambar 6. Sebaran responden berdasarkan Luasan Lahan yang Dipinjam di Kecamatan Wolasi, Baito, Kolono, dan Laeya, 2016

Berdasarkan data hasil pada Gambar 6, menunjukkan bahwa responden petani memiliki rata-rata luas lahan sawah bervariasi di empat kecamatan terpilih. Kecamatan Wolasi dan Kecamatan Baito rata-rata seluas 1,2 Ha dengan status milik sendiri. Sementara untuk Kecamatan Kolono, rata-rata luas lahan sawah milik sendiri sekitar 1,1 Ha demikian pula yang berstatus sewa. Untuk kecamatan Laeya, rata-rata luasan lahan pertanian padi sawah sekitar 1 Ha baik yang dimiliki sendiri maupun dengan sistem sewa.

Rumahtangga responden khususnya petani etnis Tolaki yang memiliki lahan maupun tidak memiliki lahan atau memiliki lahan pertanian yang sempit, nyaris sebagian besar atau pun semua hasil panen padi ladang disimpan baik untuk bibit pertanian padi ladang pada musim tanam berikutnya khususnya yang menggunakan varietas local, juga disimpan untuk dikonsumsi. Sementara bagi rumahtangga responden yang hasil panennya tidak mencukupi kebutuhan pangan rumahtangga hingga musim panen berikutnya, maka hasil panen tanaman palawija antara lain ubi kayu, ubi jalar dan jagung yang ditanam di kebun menjadi andalan

sudah dibakar itu. Ketiga, lahan itu kemudian ditanami selama satu tahun atau lebih, tergantung kepada keadaan setempat. Keempat, lahan itu kemudian ditinggalkan untuk waktu tertentu agar menjadi subur kembali. Kelima, lahan baru dibuka kembali untuk ditanami. Urutan itu diulangi dengan sejumlah lahan, sampai si petani kembali ke lahan yang pertama kali dibuka, dan mengulangi siklusnya. Ada tiga factor yang sangat penting dalam system huma ini, antara lain: tersedianya tanah, tersedianya tenaga kerja untuk memproduksi hasil tanaman yang paling pokok (*key crop*), dan lamanya musim tanam dimana hasil tanaman yang paling pokok (yang dapat terdiri dari satu atau beberapa jenis) dapat diproduksi atau diselingi dengan tanaman-tanaman pelengkap (*suplementer*). Kebutuhan akan tanah ditentukan oleh lamanya waktu yang diperlukan oleh lahan pertama, setelah dibuka dan ditanami sampai hasil panennya berkurang tajam, untuk memulihkan keseubarannya yang semula. Kemampuan itu sangat berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, dan oleh karena itu setiap pemuklurataan mengandung bahaya.

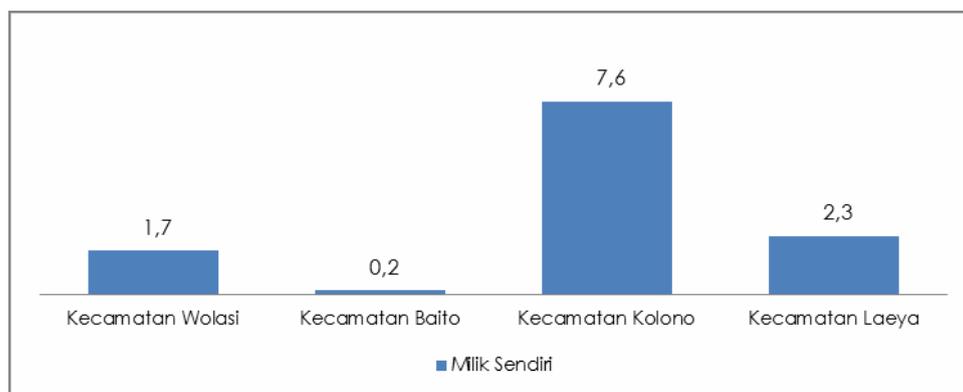
rumah tangga untuk aman pangan. Gambar berikut akan menunjukkan kepemilikan kebun campuran yang biasanya ditanami tanaman palawija oleh responden di empat Kecamatan terpilih.



Gambar 7. Sebaran responden berdasarkan Luasan Lahan yang Dipinjam di Kecamatan Wolasi, Baito, Kolono, dan Laeya, 2016

Berdasarkan Gambar 7, rata-rata kepemilikan kebun campuran secara keseluruhan pada empat kecamatan terpilih sekitar 2,3 Ha. Di Kecamatan Wolasi dengan status milik sendiri rata-rata sekitar 3,8 Ha. Kebun campuran di Kecamatan Wolasi biasanya ditanami tanaman palawija seperti ubi kayu, ubi jalar, jagung tumpang sari dengan tanaman kacang-kacangan dan sayur-sayuran. Biasanya tanaman jagung terkonsentrasi pada petakan lahan tertentu. Di Kecamatan Baito rata-rata kepemilikan kebun campuran sekitar 1,7 Ha, di Kecamatan Baito dan Laeya kebun campuran biasanya selain ditanami tanaman palawija juga ditanami dengan tanaman perkebunan seperti cengkeh, merica, dan jambu mete. Di Kecamatan Kolono seorang responden menyewa kebun dari pemilik lahan seluas 0,9 Ha, untuk ditanami tanaman palawija yang hasilnya kemudian dijual.

Sagu menjadi panganan khas khususnya bagi sebagian besar petani Tolaki. Sagu kemudian diolah menjadi panganan khas yakni sinonggi sebagai karbohidrat pengganti nasi. Berikut data rata-rata luasan lahan sagu yang dikuasai oleh responden petani di empat kecamatan terpilih.



Gambar 8. Sebaran responden berdasarkan Luasan Lahan Sagu yang Dipinjam di Kecamatan Wolasi, Baito, Kolono, dan Laeya, 2016

Secara umum rata-rata luasan lahan sagu milik responden di empat kecamatan terpilih sekitar 3 Ha. Rata-rata luasan lahan sagu terbesar berada pada kecamatan Kolono. Rata-rata petani memiliki 7,6 Ha lahan sagu sebagai sumber pangan selain hasil padi ladang. Di Kecamatan Laeya, rata-rata lahan sagu sekitar 2,3 Ha, di Kecamatan Wolasi sekitar 1,7 Ha. Yang paling sempit luasan lahan sagu di Kecamatan Baito sekitar 0,2 Ha.

## Kesimpulan

Berdasarkan data, dapat dikatakan bahwa sebagian besar petani padi ladang di keempat kecamatan yang menjadi wilayah penelitian merupakan petani pemilik. Petani lapisan bawah yang berlahan sempit atau gurem bahkan tidak berlahan atau tunakisma mengelola kegiatan pertanian bukan dengan sistem bagi hasil yang mengikat melainkan dengan sistem pinjam pakai dari pihak desa. Secara umum jika melihat seluruh luasan lahan yang dikuasai oleh responden rumahtangga petani untuk peruntukkan tidak hanya sebagai ladang, kebun campuran, persawahan dan lahan sagu, rata-rata luasan lahan yang dikuasai oleh responden baik secara milik sendiri maupun pinjam pakai maka rata-rata keseluruhan seluas 1 Ha. Pada beberapa kasus, memiliki lahan saja tidaklah cukup, karena luas lahan yang dimiliki sempit, kemudian mendorong responden petani di empat kecamatan terpilih untuk meminjam lahan pertanian. Gejala polarisasi kelas petani berdasarkan status kepemilikan lahan yang demikian tajam, yang biasa terjadi pada komunitas pertanian padi, di empat lokasi penelitian kecenderungan tersebut tidak terlihat nyata khususnya yang terjadi pada dua kecamatan antara lain di Wolasi dan Kolono. Hal ini dikarenakan selain sistem pertanian padi ladang dengan metode tebang bakar (*slash and burn*) atau huma yang berciri perladangan berpindah, juga karena adanya budaya orang Tolaki yang menjunjung nilai-nilai “pinjam tanpa balasan”.

Berdasarkan temuan penelitian, pemerintah Kabupaten dan desa harus segera melakukan pemetaan terhadap tata ruang desa, berdasarkan kajian tata ruang tersebut pemerintah juga harus menegaskan sistem kepemilikan lahan dan memberikan regulasi untuk melindungi petani-petani tunakisma yang berladang berpindah. Karena bisa dipastikan bahwa jika petani tunakisma tersingkir dari kegiatan pertanian padi ladang berpindah, akan timbul kerawanan pangan, yang memicu kemiskinan kronis, dan meledaknya kasus kriminalitas sebagai dampak dari kemiskinan. Selain itu pemerintah daerah juga harus menetapkan regulasi yang jelas dan tegas mengenai pengalihan kepemilikan lahan pertanian. Karena kecenderungan yang terjadi petani Tolaki semakin miskin tanah karena adanya budaya jual beli tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan sosial (untuk biaya menikahkan anak), sementara petani pendatang khususnya petani Jawa dan Bugis memiliki lahan yang semakin lama semakin luas. Jika tidak disikapi bisa jadi petani-petani Tolaki akan menjadi petani gurem bahkan tunakisma yang akan menyebabkan mereka jatuh dalam kondisi kemiskinan kronis, dan pada kondisi yang klimaks akan memicu konflik sosial antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang akibat munculnya polarisasi sosial yang semakin tajam.

#### Daftar Pustaka

- [1] Bernstein, Henry dan Bachriadi, Dianto. 2014. Tantangan Kedaulatan Pangan. Bandung : ARC Books.
- [2] Harun, Marinus Kristiadi dan Dwiprabowo, Hariyatno. 2014. Model Resolusi Konflik Lahan Di Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi Model Banjar (Resolution Model Of Land Conflicts In Banjar Production Forest Management Unit Model).
- [3] Hayami, Yujiro, dan Kikuchi, Masao. 1987. Dilema Ekonomi Desa (Suatu Pendekatan Ekonomi terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- [4] Wolf, Eric R. 1983. Petani Suatu Tinjauan Antropologis. Jakarta: Rajawali Press.